

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam literatur ilmu politik dikenal ada tiga sistem kepartaian yang digunakan sejumlah negara di dunia, yaitu sistem partai tunggal, sistem dua partai (dwi partai) dan sistem multipartai. Sebuah sistem kepartaian mengandung makna bahwa terdapat pola hubungan kepartaian dalam sebuah unit politik. Sistem kepartaian terdiri dari kerangka, jumlah, kekuatan, struktur dan sumber dukungannya.

Sistem multipartai terdiri dari lebih dua partai bisa ditemukan di negara-negara Eropa Barat, Belgia, Italia, dan Belanda, jarang dijumpai sebuah partai yang cukup kuat untuk mengontrol parlemen. Tak lama setelah proklamasi kemerdekaan RI sistem multipartai telah pula diberlakukan. Dalam masa demokrasi parlementer, tidak ada satupun partai yang memiliki kursi mayoritas di parlemen, sehingga pemerintah sering berganti. Sistem multipartai dipraktekkan kembali sejak diberlakukannya kembali paket tiga undang-undang politik (UU tentang partai politik, UU tentang pemilu dan UU susduk) tahun 1999.

Konsititusi (UUD 1945) tidak mengamanatkan secara jelas sistem kepartaian apa yang harus diimplementasikan. Meskipun demikian konstitusi mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multipartai. Pasal tersebut adalah pasal 6A (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pasangan

Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik". Dari pasal tersebut tersirat bahwa Indonesia menganut sistem multipartai karena yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Kata "gabungan partai politik" artinya paling sedikit dua partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan presiden untuk bersaing dengan calon lainnya yang diusung oleh partai politik lain. Dengan demikian dari pasal tersebut di dalam pemilu presiden dan wakil presiden paling sedikit terdapat tiga partai politik.

Partai politik di Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan yang cikal bakalnya muncul melalui budi utomo, kendati belum dapat disebut sebagai partai. Kebijakan politik etis belanda memungkinkan lahirnya sejumlah partai, seperti partai nasional Indonesia (PNI) dan Sarekat Islam (SI). Setelah kemerdekaan, Soekarno cenderung menghendaki adanya partai tunggal di Indonesia. Namun, kekhawatiran timbulnya fasisme mendorong pemerintah waktu itu, melalui wakil presiden Hatta mengeluarkan maklumat Nomor X tahun 1955, yang memberikan kebebasan untuk mendirikan partai. Sistem multipartai dalam konteks sistem parlementer berlangsung sampai tahun 1959. Kendati banyak partai, namun hanya ada lima partai besar yaitu PKI, Masyumi, PNI, PSI dan NU.

Sejak Soeharto menjadi presiden pada tahun 1967 partai politik dianggap sebagai penyebab dari ketidakstabilan politik yang terjadi pada tahun 1950an-1960an. Oleh karena itu agenda yang penting untuk menciptakan pemerintahan yang stabil adalah melakukan penyederhanaan partai politik. Pada pemilu pertama

di masa Orde Baru, tahun 1971, terdapat 10 partai politik, termasuk partai pemerintah (Golkar) ikut berkompetisi memperebutkan kekuasaan. Di bawah orde baru sampai tahun 1973 ada sepuluh partai yang ikut dalam pemilu 1971. Penataan atau penyederhanaan kepartaian berlangsung pada tahun 1973 sehingga hanya ada tiga organisasi kekuatan sosial politik yang boleh hidup sampai dengan era reformasi, yaitu PPP, GOLKAR, PDI. Dalam undang-undang politik tahun 1985, PDI dan PPP disebut sebagai partai politik, sementara Golkar tidak disebut sebagai partai politik, meskipun fungsi-fungsi yang diembannya tidak berbeda dengan partai politik. Era ini mampu menjamin terciptanya kestabilan politik yang cukup lama sehingga mampu mempercepat laju pembangunan, walaupun dipandang kurang demokratis. Kendati hanya ada tiga partai namun yang dominan hanyalah Golkar, sehingga mengarah pada sistem partai dominan.

Meskipun dari sisi jumlah partai politik yang berkembang di Indonesia pada saat itu, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang menganut sistem multipartai, banyak pengamat politik berpendapat bahwa sistem kepartaian yang dianut pada era Orde Baru adalah sistem partai tunggal. Ada juga yang menyebut sistem kepartaian era Orde Baru adalah sistem partai dominan. Hal ini dikarenakan kondisi kompetisi antar partai politik yang ada pada saat itu. Benar, jika jumlah partai politik yang ada adalah lebih dari dua parpol sehingga dapat dikategorikan sebagai sistem multipartai. Namun jika dianalisis lebih mendalam ternyata kompetisi diantara ketiga partai politik di dalam pemilu tidak seimbang. Golkar mendapatkan "*privelege*" dari pemerintah untuk selalu memenangkan persaingan perebutan kekuasaan.

Tumbangnya rezim Orde Baru membuka lebar pintu era kebebasan berekspresi. Euforia kebebasan politik pun muncul. Kebebasan berekspresi dalam hal aspirasi politik disalurkan melalui munculnya era multi partai jilid 2 didukung dengan sistem pemilu yang berubah secara total termasuk KPU sebagai penyelenggara Pemilu dilakukan oleh non pemerintah. Semua berkesempatan membuat Partai Politik baru dan menawarkan jargon-jargon politik baru.

Pemilu 1999 menjadi tonggak tumbuh dan berkembangannya kebebasan berekspresi terutama secara politik. Multipartai diterima sebagai konsekuensi logis kebebasan itu. Multipartai juga menjadi pilihan final sebagai jawaban atas persoalan perlunya membangun dan memperluas sebanyak mungkin saluran aspirasi politik yang dipandang akan mewarnai jalannya pemerintahan ke depan baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif tentunya.

Berlakunya Undang-undang nomor 2 tentang partai politik 1999 memungkinkan lahirnya lebih dari seratus partai. Melalui seleksi akhirnya hanya ada 48 partai. Hasil pemilu 1999 merupakan seleksi alamiah bagi penambahan peran partai dalam parlemen. Ciri lain dalam sistem multipartai setiap partai boleh menganut berbagai asas atau dasar partai yang berbeda-beda. Politik aliran yang pernah ada kini muncul kembali. Oleh karena itu, walaupun ada partai yang sama sekali baru, namun ada pula partai yang munculnya sebagai reinkarnasi partai lain. Hasil pemilu 1999 memunculkan lima partai politik besar yaitu PDI-P, Golkar, PPP, PKB dan PAN.

Hasil pemilu 1999 telah menghasilkan terbentuknya 10 fraksi di DPR, termasuk di dalamnya fraksi TNI atau POLRI. 5 fraksi terbesar adalah PDI-P (153

kursi), Golkar (120 kursi), PPP (58 kursi) dan fraksi Reformasi (41 kursi). Hasil ini masih memperlihatkan bahwa partai yang menganut paham terbuka, seperti partai Golkar dan PDI-P lebih memperoleh dukungan luas ketimbang partai yang menganut paham Agama.

Walaupun tujuan PDI-P, partai Golkar, PKB dan PAN memiliki kesamaan, namun karakteristik ketiga partai masih memperlihatkan perbedaan. PDI-P masih kuat dipengaruhi paham PNI lama dengan marhaenis, sementara PAN dengan latar belakang Muhammadiyah dan PKB dengan latar belakang NU. Partai Golkar adalah partai terbuka tempat berhimpun segala suku, agama, golongan, maupun kelompok profesi.

Secara nasional, pada pemilu 1999 partai Golongan Karya memperoleh suara sebesar 24% dan menempatkannya sebagai pemenang kedua setelah PDI-P. Ini merupakan hasil yang diluar dugaan banyak pengamat, karena disebabkan hujatan dan hantaman yang diperolehnya sejak turunya presiden Soeharto membuat partai Golkar sulit bergerak. Disamping itu sejumlah kader telah meninggalkannya dan mendirikan partai baru atau bergabung dengan partai lain.

Tak jauh berbeda kondisi yang terlihat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada pemilu 2004 GOLKAR menempatkan diri pada posisi ke lima, setelah PDI-P diurutan teratas perolehan suara. Partai politik GOLKAR hanya mampu meraup perolehan suara sebesar 15.868 seperti terlihat pada tabel di bawah berikut:

Tabel 1.1

Hasil Perolehan Suara Di Propinsi D. I. Yogyakarta Pada Pemilu 2004

No.	Nama Partai.	Perolehan Suara
1	PDIP	47.414
2	DEMOKRAT	45.620
3	PAN	26.828
4	PKS	21.546
5	GOLKAR	15.868
6	PPP	13.777
7	GERINDRA	8.788

Puncak kebebasan berekspresi dijamin secara Undang-undang melalui Pemilu Legislatif tahun 2004 yang dilanjutkan dengan Pemilu presiden 2004. Kedua Pemilu ini diselenggarakan secara langsung di mana rakyat menentukan sendiri (melalui kebijakan koalisi antar partai Politik) siapa calon wakil rakyat dan siapa presiden dan wakil presidennya. Ini merupakan komplemen era multipartai jilid 2 sekaligus Pemilu Presiden pertama yang digelar dalam sejarah pemilu yang diselenggarakan secara langsung.

Pada pemilu 2004 terjadi pemulihan citra partai golkar sehingga mampu menjadi pemenang pada pemilu legislatif secara nasional. Dengan kekuatan di lembaga legislatif yang dimiliki oleh partai Golkar saat ini, diharapkan dapat menjadi modal utama bagi partai golkar dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Pada RAPIM-I Partai Golkar Tahun 2005, posisi partai Golkar yang semula sebagai kekuatan penyeimbang berubah menjadi partai pendukung pemerintah. Dalam memberikan dukungan kepada pemerintah, partai Golkar senantiasa bersikap kritis, obyektif dan proporsional terhadap setiap langkah dan kebijakan pemerintah.

Jika kita tinjau kembali eksistensi partai golkar dalam rangka pemenangan pemilu di tingkat nasional, maka dapat dikatakan bahwa partai Golkar adalah partai pemenang. Hal ini terlihat jelas dengan hasil perolehan suara yang diperoleh partai Golkar pada setiap pelaksanaan pemilu. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Perolehan Suara Partai Golkar Pada Pemilu¹

Pemilu	Jumlah Suara	Prosentase	Jumlah Kursi	Peringkat
1971	34.348.673	62,82%	236	1
1977	39.750.096	62,11%	232	1
1982	48.334.724	64,34%	242	1
1987	62.783.680	73,16%	299	1
1992	66.599.331	68,10%	282	1
1997	84.187.907	74,51%	325	1
1999	23.741.758	22,44%	120	2
2004	24.480.757	21,58%	108	1
2009	15.037.757	14,45%	107	2

¹ www.GOLKAR.com

Di daerah ternyata tantangan yang akan dihadapi partai Golkar ke depan akan lebih berat, terlebih di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena akan terjadi proses perubahan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dengan dinamika dan kehidupan politik yang berbeda. Untuk itu partai Golkar harus mampu tampil dengan strategi baru untuk menjawab perubahan dan tantangan tersebut sehingga menjadi partai politik dan terdepan kekuatan utama dan pilar utama dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem multipartai, terbukti dari pemilu yang dilangsungkan tahun 1999, 2004 dan 2009. Sistem multipartai merupakan sistem kepartaian yang didalamnya terdapat lebih dari dua partai. Terkait dengan pemilu 2009, partai Golkar menjadi salah satu partai diantara partai-partai pengikut lainnya. Setiap partai politik secara mutlak memiliki peran dan fungsi, dan tak terkecuali partai Golkar itu sendiri.

Di era multipartai, setiap partai politik menawarkan banyak sesuatu yang menyangkut dengan peran dan fungsinya sebagai partai politik, sehingga persaingan tidak dapat dihindari. Dalam meraih simpati dari masyarakat, seharusnya partai politik tidak menjadikan masyarakat hanya sebagai obyek, terlebih dari itu partai politik harus mengedepankan hak-hak masyarakat di semua bidang. Dalam skripsi ini, saya lebih ingin melihat sejauh mana partai Golkar mampu menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai obyek, karena secara mutlak partai Golkar harus mampu menjalankan peran dan fungsinya.

Kepercayaan masyarakat terhadap partai Golkar di era multipartai ini menunjukkan bahwa partai Golkar konsisten dalam menjalankan peran dan

fungsinya sebagai partai politik, walaupun terdapat banyak partai-partai yang menawarkan hal yang sama.

Permasalahan yang paling mendasar dari sistem multipartai adalah banyak terdapatnya kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda, sehingga masyarakat harus jeli dalam menjatuhkan pilihannya terhadap salah satu partai politik. Banyaknya partai politik ini setidaknya akan memberikan kebingungan terhadap masyarakat, karena setiap partai politik akan menampilkan sesuatu yang akan menarik perhatian masyarakat. Dari permasalahan ini, saya sebagai penulis akan melihat konsistensi partai Golkar dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai partai politik di era multipartai di Indonesia saat ini.

Sistem multi partai disamping mencerminkan adanya kehidupan demokrasi di dunia politik Indonesia, juga memicu terjadinya konflik antarpolitical pada saat ini. Pengaruh partai politik pada saat ini sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu kabinet pemerintahan. Sering dilakukannya pergantian kabinet merupakan dampak dari konflik antar partai yang sering terjadi, dan inilah realitas politik yang sesungguhnya.

Pada kenyataannya peranan setiap partai dalam menyalurkan aspirasi pendukung masing-masing, dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu berusaha untuk menggabungkan kepentingan-kepentingan dari seluruh partai atau memperjuangkan kepentingan masing-masing dimana konsekuensinya adalah terjadinya banyak konflik antar partai. Ideologi dari masing-masing partai yang sangat mempengaruhi jenis kepentingan yang mereka perjuangkan terkadang menjadi alat untuk saling menjatuhkan.

Dalam skripsi ini, penulis mengambil peran partai politik sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi sebagai kontrol politik. Kedua hal ini diambil penulis karena langsung berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang medasar dalam masyarakat. Terlebih dari itu, peran sebagai penyalur aspirasi merupakan input dari kebijakan-kebijakan yang akan dibuat, sehingga output yang didapat akan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Selain itu fungsi sebagai kontrol politik adalah mengawasi dan mengontrol kebijakan-kebijakan yang keluar dari sebuah proses politik yang ada, dan diharapkan kebijakan yang keluar tersebut berpihak kepada masyarakat.

Dan penulis ingin melihat strategi yang dilakukan oleh partai Golkar dalam mempertahankan peran dan fungsinya pada perubahan kuantitas partai peserta pemilu.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi topik permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran politik partai GOLKAR D. I. Yogyakarta dalam menyalurkan aspirasi masyarakat D. I. Yogyakarta?
2. Bagaimanakah peran politik partai GOLKAR D. I. Yogyakarta dalam melakukan fungsi kontrol politik terhadap pemerintah Provinsi D. I. Yogyakarta?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

1. Mengingat partai politik adalah sebagai wadah yang menampung aspirasi masyarakat, maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui keunggulan dan kekurangan dari partai politik tersebut.
2. Melihat bagaimana peran partai Golkar dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, terkhususnya pada sistem multipartai saat ini.
3. Untuk melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh partai Golkar dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol politik terhadap pemerintah

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah agar hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana peran partai Golkar dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta melihat langkah-langkah yang dilakukan partai Golkar menjalankan fungsinya sebagai kontrol politik. Dan juga diharapkan menjadi sebuah sumbangan bagi lembaga atau institusi, yaitu partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau institusi lainnya yg berkaitan dengan peran dan langkah partai Golkar dalam menjalankan fungsinya.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah dapat melatih penulis dalam menganalisa usaha-usaha yang dilakukan oleh partai politik Golkar dalam mempertahankan serta menjalankan peran dan fungsinya. Penelitian ini juga bermanfaat dalam memperoleh jawaban atas usaha dan upaya yang dilakukan oleh partai Golkar dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai partai politik dalam lingkaran sistem multipartai.

D. KERANGKA DASAR TEORI

1. Partai Politik

Terdapat beberapa definisi partai politik, antara lain:

- a. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir anggotanya, mempunyai orientasi nilai-nilai yang sama. Kelompok ini berusaha memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.²
- b. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partai

² Pengantar Ichlasul Amal, *Teori Mutakhir Partai Politik*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988

politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan dan peranan yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi.³

c. Menurut Mark M. Hagopian

Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam rangkaian prinsip dan kepentingan ideologi melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat.

d. Menurut Raymod Girfield Gettel

Partai politik adalah *politica science* terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai kesatuan politik dengan memaknai kekuasaan memilih bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.⁴

e. Carl J. Friedrich

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan pengawasan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya berdasarkan pengawasan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material.⁵

³ Undang-undang No. 31/2002 penyempurnaan dari Undang-undang No. 2/1999

⁴ Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, 1987, hal 111-112

⁵ *Ibid* : 112

f. Soltou

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih. Bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.⁶

g. Burke

Partai politik adalah sekumpulan orang-orang yang mempromosikan usah-usaha mereka bersama-sama diletakkan atas sejumlah prinsip-prinsip khususnya yang disetujui kesepakatan tersebut bisa sebagai ideologi garis-garis besar perjuangan program dan lain-lain.

Tugas dan Fungsi Partai Politik

Partai politik dalam menjalankan perannya bagi pendidikan politik masyarakat secara optimal mempunyai tugas dan fungsi, antara lain:

Tugas Partai Politik antara lain:

- a. Tugas pokoknya untuk menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Partai politik menampung semua pendapat dan keinginan rakyat lalu memilih dan merumuskannya untuk diserahkan kepada pemerintah agar menjadi program politik yang akan diperjuangkan semaksimal mungkin.

⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta, 1992 : 116

- b. Partai politik bertugas untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan atau ide-ide yang tersimpul didalam rencana kebijakan pemerintah
- c. Partai politik bertugas mendidik warga negara menjadi orang yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial.
- d. Partai politik bertugas untuk menumbuhkan dan memupuk kesadaran akan loyalitas nasional.
- e. Partai politik bertugas untuk mencari dan mengajak serta mereka yang kelihatan dan dianggap berbakat dan mampu untuk ikut serta aktif dalam lapangan politik dan mendidik agar menjadi kader pemimpin.
- f. Partai politik bertugas mengatur perikaian, merumuskan konflik selanjutnya mengatasi dan mencari penyelesaiannya.

Fungsi Partai Politik antara lain:

- a. Fungsi utama adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.
- b. Fungsi sosialisasi, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota melalui proses ini para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.
- c. Fungsi rekrutmen, merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

- d. Fungsi Partisipasi politik, merupakan kegiatan warga negara (mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik atas suatu kebijakan umum, mendukung atau menentang calon pemimpin, memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.
- e. Pemandu kegiatan merupakan kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi alternatif kebijakan umum lalu diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
- f. Komunikasi politik, merupakan proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dari masyarakat kepada pemerintah.
- g. Pengendalian konflik, merupakan lembaga yang mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.
- h. Fungsi kontrol politik, merupakan kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kegiatan yang dibuat untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Tolak ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik

yang dianggap ideal dan baik yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk meluruskan kebijakan atau pelaksanaannya sejalan dengan tolak ukur tersebut.⁷

Selain itu terdapat juga fungsi partai politik menurut Undang-undang No. 2 tahun 1999 tentang Pemilihan umum:⁸

- a. Melaksanakan penilaian politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesabaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan permusyawaratan atau perwakilan rakyat.
- c. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.

Tipologi Partai Politik

Tipologi partai politik merupakan pengklarifikasian berbagai politik berdasarkan kriteria tertentu, antara lain:

- a. Berdasarkan asas dan orientasinya, terbagi menjadi 3 tipe yaitu:
 - 1) Partai politik pragmatis ialah partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat, kaku pada satu doktrin dan ideologi tertentu.

⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta, 1992, hal 117-121

⁸ Eman Hermawan, *Politik Membela Yang Benar*, Yayasan Kajian Dan Layanan Informasi Untuk Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, Hal 71-72

- 2) Partai politik doktriner ialah partai yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkrit sebagai penjabaran ideologi.
 - 3) Partai politik kepentingan ialah partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.
- b. Berdasarkan komposisi fungsi anggotanya, partai politik digolongkan menjadi dua, yaitu:
- 1) Partai massa (lindungan), yaitu partai politik yang hanya mengandalkan kekuatan massa pada keunggulan jumlah anggotanya dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, mengembangkan diri sebagai pelindung bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat dimobilisasi untuk dapat memenangkan pemilu dan mendukung berbagai kebijakan tertentu.
 - 2) Partai kader yaitu partai politik yang mengandalkan kualitas anggota, ketaatan organisasi dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan sangat ketat melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif serta penegakkan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu. Struktur organisasinya sangat hierarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas.

- c. Berdasarkan basis sosial dan tujuan, menurut Almod terbagi menjadi:
- 1) Berdasarkan basis sosialnya, partai politik terbagi menjadi:
 - a) Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat seperti keatas, menengah dan kebawah.
 - b) Partai politik yang beranggotakan kalangan kelompok kepentingan seperti buruh, petani dan pengusaha.
 - c) Partai politik yang beranggotakan pemeluk agama tertentu seperti Islam, Katolik dan Hindu.
 - d) Partai Politik yang beranggotakan kelompok budaya tertentu seperti suku bangsa, bahasa dan daerah tertentu.
 - 2) Berdasarkan tujuannya, partai politik terbagi:
 - a) Partai politik perwakilan kelompok, artinya partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen.
 - b) Partai pembinaan bangsa, artinya partai yang bertujuan menciptakan persatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit.
 - c) Partai mobilisasi, artinya partai yang berupaya memobilisasi masyarakat kearah penyampaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan.

2. Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian adalah pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil, yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap negara. Sistem kepartaian bergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, ia juga bergantung pada kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik. Selain itu, sistem-sistem politik yang telah disebutkan, turut mempengaruhi sistem kepartaian yang ada.

Sistem kepartaian belumlah menjadi seni politik yang mapan. Artinya, tata cara melakukan klasifikasi sistem kepartaian belum disepakati oleh para peneliti ilmu politik. Namun, yang paling mudah dan paling banyak dilakukan peneliti adalah menurut jumlah partai yang berkompetisi dalam sistem politik.

Sistem kepartaian dan partai politik merupakan dua konsep berbeda. Sistem kepartaian menunjukkan format keberadaan antar partai politik dalam sebuah sistem politik spesifik. Disebut sebagai spesifik, oleh sebab sistem politik berbeda-beda di setiap negara atau di satu negara pun berbeda-beda dilihat dari aspek sejarahnya. Sistem politik yang dikenal hingga kini adalah Demokrasi Liberal, Kediktatoran Militer, Komunis, dan Otoritarian Kontemporer.

Sedangkan Sistem Kepartaian adalah suatu mekanisme interaksi antar partai politik dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Sistem kepartaian yang dapat digunakan dalam merealisasikan interaksi antarpoliti dalam suatu sistem politik, yaitu one-party system, two-party system, multy-party system.

Sistem kepartaian bisa dikatakan pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil, yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap negara. Sistem kepartaian bergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, ia juga bergantung pada kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik. Selain itu, sistem-sistem politik yang telah disebutkan, turut mempengaruhi sistem kepartaian yang ada.

Sistem kepartaian belumlah menjadi seni politik yang mapan. Artinya, tata cara melakukan klasifikasi sistem kepartaian belum disepakati oleh para peneliti ilmu politik. Namun, yang paling mudah dan paling banyak dilakukan peneliti adalah menurut jumlah partai yang berkompetisi dalam sistem politik.

Maurice Duverger, mengidentifikasi sistem kepartaian tidak dilihat dari variabel jumlah partai tetapi atas dasar tingkat kompetisi dan oposisi partai dalam sistem politik. Ia membedakan sistem kepartaian menjadi empat, yaitu:

- a. bersifat persaingan penuh,
- b. bekerja sama dalam sistem yang kompetitif,
- c. saling bergabung dalam sistem yang kompetitif, dan
- d. saling bergabung sepenuhnya.

Sedangkan Peter Mair memuatnya dalam tabel berikut ⁹

Tabel 1.3

Peneliti	Kriteria Klasifikasi	Sistem kepartaian
Maurice Duverger (1954)	Jumlah partai	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem dua partai • Sistem multipartai
Robert Dahl (1966)	Kompetitif oposisi	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetitif murni • Kompetitif kooperatif • Kompetitif koalisi • Koalisi murni
Lionel Blondel (1968)	Jumlah Partai; ukuran partai secara relatif	<ul style="list-style-type: none"> • sistem 2 partai • sistem 2 dan setengah partai • multipartai dengan 1 partai yang dominan • multipartai tanpa partai dominan
Stanley Rokkan (1968)	Jumlah partai; kadang satu partai mayoritas; distribusi kekuatan partai minoritas;	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Britis Jerman • Sistem Skandinavia
Giovani Sartoni (1976)	Jumlah partai dan jarak ideologi	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem 2 partai • Pluralisme moderat • Pluralisme terpolarisasi • Sistem partai berkuasa

⁹ Peter Mair, *Party Systems and Structures of Competition*, dalam Lawrence LeDuc, ed., et.al., *Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective*, (California: Sage Publications, 1996)

Dari tabel di atas, kelihatan beberapa cara melakukan klasifikasi sistem kepartaian. Maurice Duverger melakukannya menurut jumlah partai, Robert Dahl menurut skala kompetisi yang opositif, Blondel melakukan menurut ukuran jumlah dan besar partai secara relatif, Rokkan menurut jumlah partai, kadang-kadang satu partai mayoritas, dan distribusi kekuatan partai-partai minoritas, dan Giovanni Sartori menurut jumlah partai dan jarak ideologi antar partai-partai tersebut.

Mair sendiri cenderung menyebut klasifikasi Giovanni Sartori sebagai yang paling dekat untuk digunakan. Alasannya, pertama, klasifikasi Sartori bersifat paling komprehensif dan bisa diterapkan pada kasus-kasus empiris (nyata). Kedua, ia bisa diterapkan di negara-negara dengan jumlah dan sistem kepartaian berbeda. Misalnya Amerika Serikat yang sistem 2 partai, India yang satu partai berkuasa (Kongres), Malaysia yang satu partai berkuasa (UMNO), Jepang yang satu partai berkuasa (Liberal Demokrat). Ketiga, klasifikasi tersebut tetap memperhatikan pola-pola kompetisi dan interaksi antar partai dan cocok dengan pengertian sistem kepartaian itu sendiri. Keempat, ia mengkaitkan antara perilaku pemilih dengan hasil pemilihan.

Sistem kepartaian di Indonesia. Giovanni Sartori mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi 4 macam, yaitu Sistem 2 Partai, Pluralisme Moderat, Pluralisme Terpolarisasi dan Sistem Partai Berkuasa. Sartori membagi keempat sistem kepartaian tersebut berdasarkan ideologi yang dianut masing-masing partai serta banyaknya partai yang diakui dan ikut dalam setiap pemilihan umum.

Sistem 2 Partai menurut Sartori adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan format terbatas dan jarak ideologi yang tidak terlalu jauh. Misalnya terjadi di Inggris, di mana meskipun banyak partai berdiri, tetapi hanya 2 partai yang eksis di setiap Pemilu, yaitu Partai Buruh dan Partai Konservatif. Hal ini juga terjadi di Amerika Serikat, di mana Partai Republik dan Partai Demokrat yang hadir di setiap Pemilu, untuk kemudian memegang kendali pemerintahan.

Pluralisme Moderat adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan pluralisme terbatas dan jaran ideologi antarpantai yang tidak terlampau jauh. Ini terjadi di Denmark.

Pluralisme Terpolarisasi adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan pluralisme ekstrim dan besarnya jarak ideologi antar partai. Ini terjadi di Italia selama tahun 1970-an dan Chili sebelum kudeta tahun 1973.

Partai Berkuasa adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan adanya 1 partai yang selalu memenangi kursi di Parlemen. Seperti telah disebut, ini terjadi di Malaysia, India, dan Jepang. Partai yang ikut pemilu tetap banyak, akan tetapi yang menang adalah partai yang "itu-itu" saja.

Namun, jika ditilik dari metodenya, metode yang paling konvensional dalam mengklasifikasikan partai politik adalah berdasarkan dari jumlah partai politik yang ada di dalam suatu Negara. Dengan cara konvensional tersebutlah dikenal adanya tiga klasifikasi partai politik, yaitu sistem partai tunggal, dwi partai dan multipartai.

a. Sistem Partai Tunggal

Istilah ini dipakai untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu Negara, maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan antara partai lainnya, dalam kategori terakhir terdapat banyak variasi. Sistem ini juga diindikasikan sebagai suasana non kompetitif, oleh karena partai politik yang ada harus menerima pimpinan dari partai yang dominan.

Bentuk ini bisa diketemukan di Negara-negara komunis seperti RRC, Uni Sovyet, dan yang paling terkenal adalah Uni Sovyet. Partai komunis di Uni Sovyet bekerja dalam suasana non kompetitif, tidak ada partai lain yang boleh bersaing dan oposisi dianggap sebagai bentuk penghinaan.

b. Sistem Dwi Partai

Pengertian sistem dwi partai biasanya diartikan dengan adanya dua atau lebih partai, tetapi dengan peranan dominan dari dua partai. Hanya beberapa Negara saja yang dewasa ini memiliki ciri-ciri sistem dwi partai, kecuali Inggris dan Amerika Serikat.

Dalam sistem pemilihan ini partai yang kalah berperan sebagai oposisi utama, tetapi setiap terhadap kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peranan sewaktu waktu dapat bertukar tangan, dalam persaingan memenangkan pemilu, kedua partai berusaha untuk merebut dukungan orang-orang yang ada ditengah dua partai dan sering disebut dengan pemilihan terapung atau mengambang.

Sistem pemilihan ini tidak mendorong tumbuhnya partai baru sehingga mempekukuhkan sistem dwi partai.

c. Sistem Multipartai

Tumbangnya rezim Orde Baru membuka lebar-lebar pintu era kebebasan berekspresi. Euforia kebebasan politik pun muncul. Kebebasan berekspresi dalam hal aspirasi politik disalurkan melalui munculnya era multi partai jilid 2 didukung dengan system pemilu yang berubah secara total termasuk KPU sebagai penyelenggara Pemilu dilakukan oleh non pemerintah. Semua berkesempatan membuat Partai Politik baru dan menawarkan jargon-jargon politik baru.

Sedikit menengok sejarah Pemilu Indonesia bahwa era multi partai sudah muncul sejak pemilu Orde Lama diselenggarakan pertama kalinya tahun 1955 yang didorong dengan keluarnya Maklumat X sebagai pondasi awal dilaksanakannya Pemilu. Multi Partai pada saat itu berakhir sejak penguasa Orde Baru mengebiri Partai Politik melalui Fusi Parpol sehingga sejak tahun 1971 hanya ada 2 Partai Politik (Partai Demokrasi Indonesia-Partai Persatuan Pembangunan) dan Satu Perkumpulan (bukan Partai Politik melainkan) Golongan Karya (Golkar).¹⁰

Sejarah Pemilu Orde Baru adalah sejarah penyelenggaraan pesta demokrasi seremonial dimana pemenang Pemilu sudah bisa ditebak sebelumnya, karena semua didesign untuk melanggengkan kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto melalui Golongan Karya.

¹⁰ www.WordPress.com

Dan itu terbukti; tidak saja kuat kekuasaannya melainkan juga melahirkan kebosanan secara massif karena kebebasan berekspresi, berkumpul, berpendapat dan berserikat dibatasi sedemikian rupa hingga munculah era reformasi tahun 1998.

Umumnya dianggap bahwa keanekaragaman dalam komposisi masyarakat menjurus pada perkembangan sistem multipartai. Dimana perbedaan ras, agama atau suku bangsa adalah kuat, golongan masyarakat lebih cenderung untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas daripada bergabung dengan kelompok lain yang berbeda orientasinya.

Maka dari itu, dianggap bahwa pola multipartai lebih mampu menyalurkan keanekaragaman budaya dan politik dalam suatu masyarakat daripada dwi partai. System ini ditemukan di Malaysia, Belanda, Perancis dan Indonesia.¹¹

Pola multipartai umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan perwakilan berimbang yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan kecil. Melalui sistem ini, perwakilan berimbang partai-partai kecil dapat menarik keuntungan dari ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya di suatu daerah pemilihan dapat ditarik ke daerah pemilihan yang lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memenangkan satu kursi.

Sistem multi partai adalah sistem kepartaian yang terdiri atas dua atau lebih parpol yang dominan. Sistem multipartai merupakan produk

¹¹ Miriam Budiarto, *Demokrasi Di Indonesia, Jakarta* : PT Gramedia Pustaka Utama, 1996, Hal. 209

dari struktur masyarakat yang pluralis, heterogen serta majemuk. Kemajemukan struktur masyarakat dalam sistem multipartai dapat dilihat mulai dari sisi religiositas hingga etnisitas serta dilihat dari perbedaan keberagaman sosio-kultural hingga perbedaan sosio-ekonomi.

Secara sederhana sistem multipartai (sistem banyak partai, multipartai sistem, multi partism, poly-partism) terwujud manakala mayoritas mutlak dalam lembaga perwakilan rakyat dibentuk atas dasar dua kekuatan atau lebih, atau eksekutifnya tidak homogen. Mayoritas mutlak demikian tidak pernah terwujud melalui kerjasama, koalisi, atau aliansi.¹²

Sistem multipartai ini banyak diterapkan diberbagai negara yang menganut paham demokrasi (Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Latin). Sistem kepartaian jelas tidak hanya menentukan susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD melainkan juga sistem pemerintahan.

Konsekuensi sistem multipartai tidak hanya mempengaruhi mekanisme dan efisiensi pembahan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah di DPR atau DPRD, melainkan juga birokrasi pemerintahan yang harus dipengang oleh banyak orang sebagai representasi dari partai politik yang menang dalam pemilihan umum. Wakil-wakil rakyat yang duduk di legislatif dan pemerintahan akan memperjuangkan aspirasi para pendukungnya yang sangat bervariasi.

Di antara dampak sistem multipartai yang penting untuk dicatat adalah keharusan pementukan pemerintahan koalisi (governing

¹² Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung, Algensiondo, 2006, Hal 67

Coalition), yang dalam praktik di masa lalu banyak menimbulkan kesulitan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan strategi karena mempertimbangkan banyak faktor.

Penguatan sistem multi partai dengan UU No. 2 tahun 2008 yang diharapkan dapat mewujudkan kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab dan perlakuan yang tidak diskriminatif seperti yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang.

3. Sistem Perwakilan Politik Di Indonesia

Memahami Teori Perwakilan Politik Sistem perwakilan politik formal di Indonesia bisa dilihat dalam beberapa jenis:

- a. Perwakilan kekuatan politik dalam teritori tertentu (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota);
- b. Perwakilan Teritori (DPD);
- c. Eksekutif bagi teritori seluruh wilayah nasional (Presiden dan Wapres); dan
- d. Eksekutif bagi teritori daerah (Gubernur/Wagub, Walikota/Wawali, dan Bupati/).

Terlihat jelas bahwa perwakilan politik di Indonesia mempunyai klasifikasi tingkatan wilayah tersendiri. Secara teoritis perwakilan pada dasarnya adalah konsep yang menunjukkan hubungan antara individu-individu, yakni pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili, dimana orang yang mewakili memiliki sederajat kewenangan.

Perwakilan merupakan proses hubungan manusia dimana seseorang tidak hadir secara fisik tapi tetap melakukan sesuatu karena perbuatannya itu dilakukan oleh orang yang mewakilinya.¹³ Perwakilan politik adalah individu atau kelompok orang yang dipercayai memiliki kemampuan dan berkewajiban untuk bertindak dan berbicara atas nama satu kelompok orang yang lebih besar. Dengan demikian indikator yang bisa digunakan untuk melihat apakah seorang wakil dinilai representatif oleh orang yang mewakilinya adalah:

- a. Memiliki ciri yang sama dengan konstituen (pemilih)
- b. Memiliki ekspresi emosi yang sama dengan emosi konstituen
- c. Intensitas komunikasi yang tinggi dengan konstituen (Sanit:54;85)

Dalam hal yang sama, Sartori mengemukakan 7 (tujuh) kondisi yang mengindikasikan telah terwujudnya perwakilan politik dalam mekanisme pemerintahan:

- 1) Rakyat secara bebas dan periodik memilih wakil rakyat (The people freely and periodically elect a body of representative).
- 2) Pemerintah bertanggungjawab kepada pemilih (The government is accountable or responsible to the governed).
- 3) Rakyat merasa sebagai negaranya (The people feel the same as the state),
- 4) Rakyat patuh pada keputusan pemerintahnya (The people consent to the decisions of their government),

¹³ Sanit, Arbi. *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press. 1985

- 5) Pemerintah adalah wakil yang melaksanakan instruksi dari para pemilihnya (The governors are agent or delegates who carry out the instruction received from their electors).
- 6) Rakyat yang menentukan membuat keputusan-keputusan politik yang relevan (The people there, in some significant way, in the making of relevant political),
- 7) Pemerintah adalah contoh wakil dari rakyat (The governors are a representative sample of the governed).¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perwakilan politik dapat didefinisikan sebagai pelimpahan sementara atas kewenangan politik warga negara kepada (sekelompok) orang yang mereka pilih secara bebas, untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan rakyat yang secara jelas dirumuskan.

Sedangkan varian perwakilan menurut Hoogerwerf dalam sudut pandang hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakili dapat digolongkan kedalam lima tipe:

a. Tipe Utusan.

Yakni wakil yang bertindak sesuai dengan perintah dari pihak yang diwakilinya,

b. Tipe Wali.

Yakni wakil memperoleh kuasa penuh dari pihak yang diwakili, dan ia dapat bertindak atas dasar pertimbangan sendiri. Dengan demikian keberadaan wakil tidak tergantung pihak yang diwakilinya.

¹⁴ Sartori, Giovanni. *The Theory of Democracy Revisited*, Part One, Chatham, NL, House Publisher, Inc. 1968.

c. Tipe Politics.

Yakni kombinasi antara tipe utusan dan tipe wali. Tergantung pada situasi, wakil kadang harus berperan sebagai wali, kadang sebagai utusan.

d. Tipe Kesatuan.

Yakni seluruh anggota lembaga perwakilan dipandang sebagai wakil dari seluruh rakyat, tanpa membedakan asal partai politik yang mempromosikan mereka.

e. Tipe penggolongan.

Yakni anggota lembaga perwakilan dilihat sebagai wakil dari kelompok teritorial, sosial, dan politik tertentu (Sartori:68;468).

Dari klasifikasi Hoogerwerf ini tampak bahwa para wakil Indonesia berada pada situasi dilematis. Di satu sisi, mereka dapat dimasukkan sebagai tipe kesatuan. Di lembaga perwakilan, para wakil rakyat harus lebih berorientasi kepada kepentingan rakyat, tanpa memandang pengelompokan politik yang ada. Pada sisi yang lain, ada ikatan yang sangat erat antara para wakil rakyat dengan organisasi politiknya, bahkan dengan kelompok teritorialnya atau daerahnya.

Wakil yang “benar” dalam sudut pandang cita-cita demokrasi adalah wakil tipe kesatuan (integrated). Alasan yang bisa dikemukakan adalah bahwa mandat representatif dimiliki oleh tipe kesatuan seperti dikemukakan oleh Hoogerwerf.

Partai politik dalam hal ini hanyalah alat atau “kendaraan” yang digunakan oleh orang untuk menjadi wakil rakyat. Lembaga Perwakilan (DPR) merupakan arena dimana dia berbuat atas nama dan kepentingan rakyat yang diwakili.

Bahkan pada saat dia beraktivitas sebagai wakilnya rakyat, tidak relevan bila dikaitkan dengan alat atau “kendaraan” yang digunakannya selama ini.

Selanjutnya, ada dua teori klasik yang sangat dikenal dalam politik tentang hakikat hubungan antara wakil (legislator) dengan terwakil (rakyat) yakni teori mandat (functional Representation) dan teori kebebasan (Political Representation).

Pertama, Teori Mandat. Menurut teori mandat ini yang pertama kali diperkenalkan oleh J.J. Russeau, bahwa wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakil dalam proses kehidupan politik. Maka seharusnya wakil selalu memberikan pandangan bersikap dan bertindak sejalan dengan mandat dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, pandangan wakil secara pribadi tidak diperkenankan dan dipergunakan dalam kualifikasinya sebagai wakil bagi terwakil. Bila terjadi perbedaan pandangan, sikap dan tindakan antara wakil dengan pihak yang diwakili dapat berakibat turunnya reputasi wakil.

Teori ini dianggap lebih menguntungkan karena wakil dapat dikontrol secara setiap saat.

Kedua, Teori Kebebasan (Political Representation). Pendapat ini dikembangkan oleh Abbe Sieyes di Perancis, serta Block Stone di Inggris. Menurut teori ini, wakil dapat bertindak bebas tanpa tergantung instruksi yang diberikan oleh pihak yang diwakilinya. Wakil merupakan orang yang terpercaya, terpilih, serta memiliki kesadaran akan hukum dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Oleh sebab itu mereka dapat melakukan tindakan apa pun atas nama mereka. Dalam hal ini terwakil telah memberikan kepercayaan kepada wakilnya.

Karena itu pertimbangan wakil secara pribadi yang memperhatikan keseluruhan aspek yang terikat kepada masalah yang dihadapi amat menentukan keputusan dan sikap wakil.

Fungsi-Fungsi Lembaga Perwakilan Politik

Secara konseptual, Parlemen memiliki tiga fungsi utama; fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiganya ditopang oleh dua fungsi yang lain: fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan dan fungsi komunikasi politik. Walaupun kelima fungsi itu bekerja dengan cara dan ruang lingkup yang berbeda, namun kelima fungsi itu pada dasarnya mempunyai kaitan yang erat satu dengan yang lain. Misalnya, dalam menjalankan fungsi pengawasan, setiap anggota Parlemen menerima amanat publik untuk memastikan implementasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Daerah akan mengacu pada kepentingan publik.

Parlemen harus memastikan seberapa jauh pemerintah mampu mewujudkan tujuan-tujuan dan kepentingan bersama yang sudah disepakati oleh publik pada proses legislasi dan penganggaran. Demikian pula ketika Parlemen harus menjalankan fungsi legislasi dan anggaran. Kedua fungsi itu akan bisa menghasilkan kebijakan yang lebih efektif (tepat sasaran), apabila Parlemen mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.

Dengan melakukan pengawasan yang baik, Parlemen selain bisa mencegah sedini mungkin penyimpangan terhadap tujuan yang telah ditetapkan dalam proses legislasi dan anggaran, Parlemen juga bisa mendapatkan bahan-

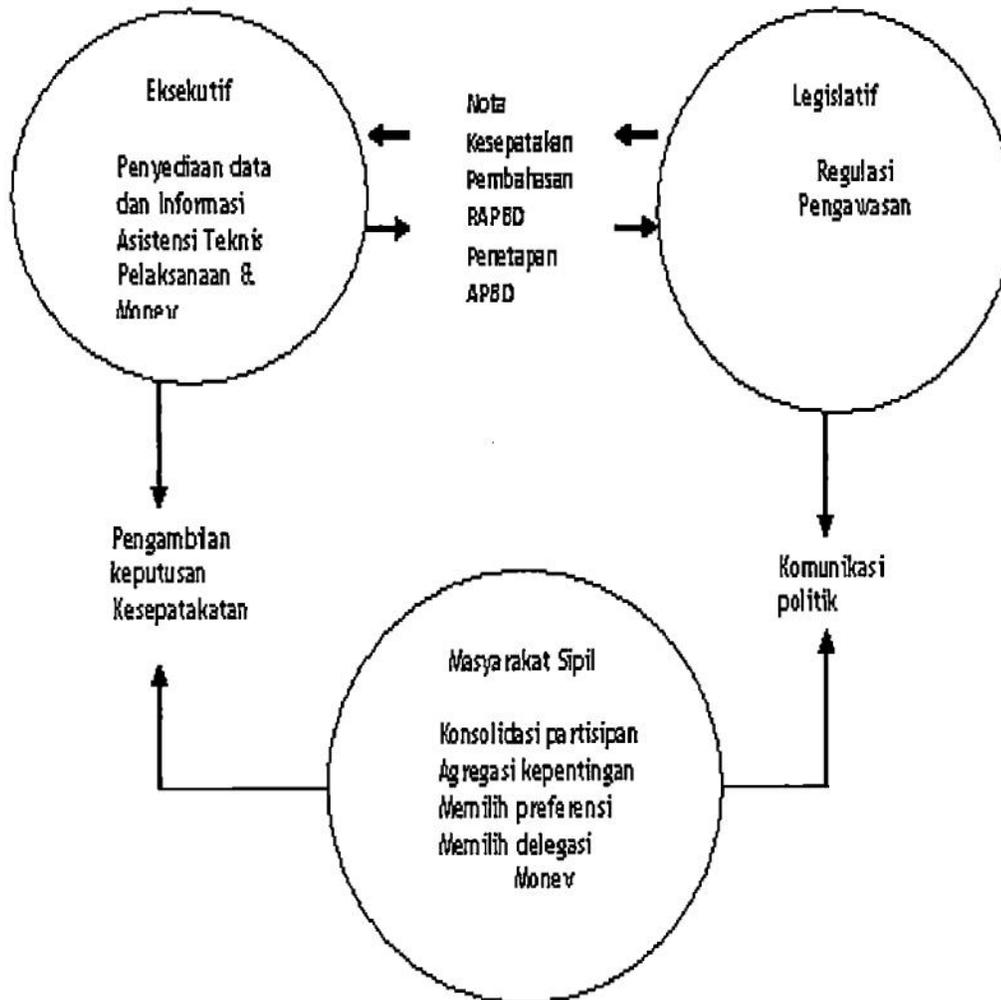
bahan dalam menyempurnakan produk legislasi dan anggaran sesuai dengan temuan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Dengan demikian, didalam menjalankan fungsi pengawasan bentuk atau model pengawasan yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan dan menyetujui kebijakan mengenai isu tertentu sehingga pemerintah harus menjalankan kebijakan berdasarkan kebijakan yang sudah disetujui oleh Parlemen. Pengawasan dengan cara melahirkan kebijakan ini sering disebut pengawasan melalui legislasi (*control by legislation*). Contoh lain didalam optimaliasi fungsi pengawasan adalah dengan memperkuat fungsi anggaran atau sering disebut dengan pengawasan melalui proses penganggaran (*budgetary control*). Misalnya dengan memotong anggaran belanja perjalanan dinas karena terlalu besar dan tidak masuk akal, tidak mensetujui kegiatan yang tidak penting dan cenderung menghambur-hamburkan uang, menghapuskan upah pungut pajak, dan sebagainya.

Keterkaitan antar kelima fungsi itu mengandung arti bahwa kelimanya perlu dijalankan secara simultan dengan proporsi yang lebih seimbang. Ketimpangan dalam menjalankan fungsi-fungsi Parlemen tersebut tentu saja akan mempengaruhi *performance* Parlemen secara keseluruhan. Karena bagaimanapun, publik akan cenderung akan menilai Parlemen tidak bekerja secara maksimal, apabila Parlemen hanya menjalankan atau menitikberatkan satu atau dua fungsi saja. Dengan demikian, kapasitas Parlemen dalam menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran harus diimbangi dengan kapasitas Parlemen dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan.

Gambar 1.1¹⁵

Peran Warga, Pemerintah dan Parlemen dalam Perencanaan dan
Penganggaran Partisipatif



Proses-proses pembuatan kebijakan publik yang partisipatif termasuk penyusunan rencana dan anggaran-pada dasarnya terjadi pada ruang masyarakat sipil. Pada proses ini masyarakat mengkonsolidasi partisipan, mengagregasi kepentingan, memilih preferensi, memilih delegasi, dan melakukan monitoring

¹⁵ www.vanillamist.com

dan evaluasi. Ketika terjadi proses partisipatif di masyarakat, bukan berarti pemerintah diam. Pemerintah harus terlibat dalam proses tersebut. Hanya dalam proses ini pemerintah tidak bertindak sebagai wakil yang diberi mandat oleh rakyat melainkan menyediakan data dan informasi karena data sumber daya publik ada di pemerintah, melakukan asistensi teknis karena pemerintah memang dididik untuk memiliki keterampilan teknis perencanaan, dan melaksanakan keputusan yang disepakati. Sedangkan legislatif dapat terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran partisipatif sebagai bagian dari komunikasi politik dengan konstituen.

4. Sistem Pemilihan Umum

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

a. Single Member Constituency

Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis (yang bisa disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk keperluan ini Negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat ditentukan oleh jumlah distrik.

Para pendukung sistem ini berasumsi bahwa dengan diterapkan sistem ini diharapkan dapat memperkuat peran serta fungsi lembaga legislatif dalam sistem politik yang berlaku. Dengan pengawasan setiap

distrik pemilihan terhadap wakilnya diharapkan mampu meningkatkan kinerja legislator.¹⁶

b. Multi Member Constituency

Dengan sistem ini perwakilan proporsional tidak ada pembagian wilayah pemilihan karena pemilihan bersifat nasional. Pembagian kursi di badan perwakilan rakyat didasarkan pada jumlah presentase suara yang diperoleh masing-masing partai.

Dalam sistem ini setiap suara dihitung dalam arti bahwa suara partai dalam suatu daerah dapat ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai politik dalam daerah pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan.

Sistem perwakilan ini sering dikombinasikan dengan beberapa prosedur atau aturan-aturan lainnya, antara lain dengan sistem daftar, dimana partai mengajukan satu calon dan pemilih hanya bisa memilih salah satu dari daftar tersebut.¹⁷

Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sebuah negara, terutama yang menggunakan jenis sistem politik Demokrasi Liberal. Pemilihan Umum yang mendistribusikan perwakilan kepentingan elemen masyarakat berbeda ke dalam bentuk representasi orang-orang partai di parlemen. Sebab itu, pemilihan sebuah sistem pemilihan umum perlu disepakati bersama antara partai-partai politik yang terdaftar (yang sudah duduk di parlemen) dengan pemerintah.

¹⁶ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 2000 hal 177

¹⁷ *Ibid*

Secara garis besar jenis-jenis sistem pemilu yang banyak dipakai di dunia, adalah :

- a. Sistem Mayoritas/Pluralitas menghendaki kemenangan partai atau calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak. Calon legislatif atau partai dengan suara yang kalah otomatis tersingkir begitu saja. Varian dari sistem Mayoritas/Pluralitas adalah First Past The Post, Two Round System, Alternative Vote, Block Vote, dan Party Block Vote.
- b. Sistem proporsional biasanya diminati di negara-negara dengan sistem kepartaian Plural ataupun multipartai (banyak partai). Meskipun kalah di suatu daerah pemilihan, calon legislatif ataupun partai politik dapat mengakumulasikan suara dari daerah-daerah pemilihan lain, sehingga memenuhi kuota guna mendapatkan kursi. Varian sistem Proporsional adalah Proporsional Daftar dan Single Transverable Vote.
- c. Sistem Mixed (campuran) merupakan pemaduan antara sistem Proporsional dengan Mayoritas/Pluralitas. Kedua sistem pemilu tersebut berjalan secara beriringan. Hal yang diambil adalah ciri-ciri positif dari masing-masing sistem. Varian dari sistem ini adalah Mixed Member Proportional dan Parallel.
- d. Sistem Other/Lainnya adalah sistem-sistem pemilu yang tidak termasuk ke dalam 3 sistem sebelumnya. Varian dari sistem lainnya ini adalah Single No Transferable Vote (SNTV), Limited Vote, dan Borda Count.

Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum. Khususnya untuk pemilihan anggota parlemen (baik pusat maupun daerah) digunakan jenis

Proporsional, yang kadang berbeda dari satu pemilu ke pemilu lain. Perbedaan ini akibat sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti jumlah penduduk, jumlah partai politik, trend kepentingan partai saat itu, dan juga jenis sistem politik yang tengah berlangsung.

Indonesia yang merdeka tahun 1945 cukup sering menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilu-pemilu yang pernah terjadi adalah 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004.

Jadi, Indonesia telah mengadakan sekitar 9 kali pemilihan umum dalam perjalanan politiknya. Masing-masing pemilihan umum memiliki karakteristik masing-masing, bergantung pada tipe sistem politik yang berlangsung. Sistem Demokrasi Liberal menaungi pemilu 1955, 1999, dan 2004. Pemilu-pemilu lainnya terjadi di masa sistem politik rezim otoritarian kontemporer Orde Baru.

Tipe sistem pemilihan umum yang banyak dipakai di Indonesia adalah Proporsional, dengan beberapa pengecualian. Guna mempermudah penggambaran sistem pemilihan umum yang dianut Indonesia, ada baiknya kita lakukan pembicaraan menurut karakteristik masing-masing pemilu.

Jika ditilik sebelum adanya amandemen UUD 1945 tentang bentuk atau sistem "Kerakyatan yang dipimpin oleh hekmata kebijaksanaan dalam permusyawarah/perwakilan" dijabarkan untuk mencapai mufakat ,diadakan musyawarah dengan cara perwakilan. Sehingga pelaksanaannya dalam pemilu memilih partai. Partai sebagai wadah atau wahana untuk menyalurkan ide atau gagasan yang berkaitan dengan negara dan bangsa. Rakyat mempunyai hak memilih partai di dalam pemilu, yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.

Partai-partai yang mengikuti pemilu menggodok caleg atau mempersiapkan membuat caleg melewati selektif yang sangat ketat. Seleksi ini dari tingkat bawah sampai tingkat atas.

Dalam seleksi, partai-partai tersebut mengambil dari ribuan orang yang duduk didalamnya, diambil beberapa orang yang terbaik. Misalkan partai A mengambil 100 orang dari hasil seleksi yang terbaik. Partai A tersebut mendapatkan kuota berdasarkan hasil perolehan suara dalam pemilu. Misalkan 50 orang. Sehingga partai A menyeleksi lagi dari 100 orang diambil 50 orang dari peringkat teratas yang terbaik duduk sebagai anggota DPR. Sistem tersebut menghasilkan DPR maupun MPR yang berkualitas atau betul-betul proposional, karena prosesnya melewati seleksi yang panjang untuk bisa menjadi anggota DPR maupun MPR.

Dampak pelaksanaan pemilu secara perwakilan:

- a. Biaya pemilu sangat sedikit, sehingga menghemat dana APBN
- b. Dengan cara perwakilan, menghasilkan DPR maupun MPR yang proposional dan berkualitas
- c. Tidak menimbulkan adanya praktek-praktek uang
- d. Pelaksanaannya simpel dan mudah
- e. Sesuai dengan sumber hukum yang ada yaitu adanya kata “ Musyawarah/ Perwakilan”
- f. Fungsi partai sebagai wahana idiologi bangsa dan negara

Tetapi melalui perkembangannya mengalami perubahan. Perubahan mengikuti perkembangan demokrasi di Indonesia. Adanya perubahan

mempengaruhi pelaksanaan sistem pemilu. Pelaksanaan sistem pemilu merupakan penjabaran dari sumber hukum yang ada di Indonesia. Dari sumber hukum yang ada terdapat kalimat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hekmata kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan“ Adanya perubahan, juga mempengaruhi pengertian dan penafsiran terhadap kalimat tersebut di atas. Akhirnya muncul pemilu secara langsung.

Namun, dari aspek setelah amandemen UUD 1945 bergulir tahun 1999 sampai dengan 2002. Dapat dikatakan bahwa proses waktu amandemen UUD 1945 selama 4 tahun, dengan biaya yang tidak sedikit. Adanya amandemen UUD 1945 berdampak terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya di Indonesia. Misalkan tentang politik, seperti sistem pelaksanaan pemilu. Dalam pemilu, rakyat memilih langsung tanpa melewati perwakilan. Sehingga rakyat memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR Pusat, DPR Propinsi, DPD Propinsi, DPR Kabupaten dan sebagainya secara langsung.

Dampak pemilihan secara langsung terhadap bangsa dan negara

- a. Pemilihan secara langsung tidak menghasilkan DPR maupun MPR yang berkualitas, karena tanpa adanya seleksi anggota DPR maupun MPR terlebih dulu.
- b. Banyak menghabiskan dana APBN. Coba hitung saja, dana yang digunakan selama 5 tahun dari beberapa pemilihan
- c. Munculnya praktek-praktek uang
- d. Pelaksanaannya sangat rumit dan menimbulkan saling menyalahkan.
- e. Caleg dalam satu partai tidak rukun , karena berbeda kepentingannya.

- f. Fungsi partai hanya sebagai kendaraan orang-orang kaya yang ingin duduk di DPR maupun MPR

Pemilihan umum legislatif

Sistem pemilihan adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara memilih para wakilnya. Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR atau DPRD, sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen. Namun, ketika pemilihan itu terjadi pada seorang calon anggota legislatif, sistem pemilihan itu bisa berwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. Dalam bahasa yang sederhana, sistem pemilihan ini pada dasarnya berkaitan dengan cara pemberian suara, penghitungan suara, dan pembagian kursi.¹⁸

Dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi perwakilan, sistem pemilihan penting karena beberapa alasan.

Pertama, sistem pemilihan mempunyai konsekuensi-konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan. Sistem pemilu proporsional misalnya, diyakini dapat menjamin tingkat proporsionalitas hasil pemilihan dibanding dengan sistem pemilu yang lain.

Kedua, sistem pemilihan mempunyai pengaruh pada jenis kabinet yang akan dibentuk, apakah akan menghasilkan suatu bentuk kabinet satu partai atau

¹⁸ Subekti, Valina Singka. 1998. "Electoral Law Reform as A Prerequisite to Create Democratization in Indonesia". Makalah yang disampaikan pada International Conference tentang Towards Structural Reforms for Democratization in Indonesia: Problems and Prospects. Jakarta.

koalisi antar partai. Sistem pemilihan proporsional misalnya, cenderung menghasilkan kabinet koalisi antar partai dibanding sistem pemilihan lainnya.

Ketiga, sistem pemilihan mempunyai pengaruh kepada bentuk sistem kepartaian, khususnya berkaitan dengan jumlah parpol di dalam sistem kepartaian. Sistem pemilu proporsional diyakini cenderung menghasilkan sistem banyak partai dibandingkan sistem kepartaian lainnya.

Keempat, sistem pemilihan mempunyai pengaruh kepada akuntabilitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihnya. Ada sistem pemilu yang secara internal dapat memaksa para wakil terpilih bertanggung jawab kepada para pemilihnya, sehingga tingkat akuntabilitas politiknya tinggi.

Kelima, sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik. Misalnya sistem pemilihan proporsional cenderung menciptakan fragmentasi partai-partai politik dibandingkan sistem pemilihan yang lain.

Keenam, sistem pemilihan berpengaruh pada bentuk dan tingkat partisipasi politik warga. Ada kecenderungan, negara-negara yang menerapkan sistem pendaftaran pemilihan secara aktif (pemilih mendaftarkan diri ke panitia pemilihan) menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi politik dalam pemilu.

Ketujuh, sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasikan dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya. Oleh karena itu, jika seseorang bermaksud mengubah tampilan atau wajah demokrasi di suatu negara, hal itu dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan sistem pemilihannya.

Kedelapan, sistem pemilihan dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya. Akibatnya, pemilu yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai tolok ukur demokrasi, dalam banyak hal tidak bisa menjadi parameter yang akurat, khususnya di beberapa negara yang sedang berkembang.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana sebenarnya kerangka kerja masing-masing sistem pemilihan dan perlu diperhatikan juga apa implikasi masing-masing sistem pemilihan tersebut bagi kehidupan politik di suatu negara. Memilih sebagai rakyat untuk menjadi pemerintah adalah suatu proses dan kegiatan yang seyogyanya merupakan hak semua rakyat yang kelak diperintah oleh orang-orang yang terpilih tersebut. Proses dan kegiatan memilih itu semua rakyat harus turut serta tanpa dibeda-bedakan. Maka dipakailah sebutan pemilihan umum.

Di Indonesia sistem pemilihan legislatif yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka dan ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten atau Kota.

Artinya, masyarakat langsung memilih orang yang dicalonkan partai politik. Dalam perhitungan suara apabila masyarakat hanya memilih partai saja tidak sah, pemilih harus memilih partai serta individu. Dan kemudian suara terbanyak belum tentu menjadi pemenang harus disesuaikan dengan jumlah bilangan pembagi pemilih. Maka, jumlah suara yang ada digabungkan menjadi

satu dimulai dari nomor satu dan apabila ada sisa suara diberikan pada nomor urut berikutnya.¹⁹

E. DEFINISI KONSEPSIONAL

Definisi konseptual adalah penjelasan atas batasan-batasan antara konsep satu dengan konsep lain yang dipergunakan dalam sebuah penelitian agar dalam penelitian tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pengertian atau batasan-batasan istilah yang ada dalam pokok masalah penelitian. Definisi konsep dipergunakan untuk menjelaskan makna konsep-konsep yang dipakai dalam penulisan skripsi, adapun batasan-batasan dari penelitian ini, antara lain:

1. Partai Politik

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir dan memiliki kepentingan yang sama untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam ruang lingkup lokalitas, biasanya melalui pemilihan umum.

2. Sitem Kepartaian

Sistem kepartaian merupakan pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil, yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap negara. Sistem kepartaian bergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, ia juga bergantung pada kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada.

¹⁹ Topo, Santoso, dan Didik Suprianto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta : PT Raja Jekson Limbong

3. Sistem Perwakilan Politik

Sistem perwakilan politik merupakan konsep yang menunjukkan hubungan antara individu-individu, yakni pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili, dimana orang yang mewakili memiliki sederajat kewenangan konsep yang menunjukkan hubungan antara individu-individu, yakni pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili, dimana orang yang mewakili memiliki sederajat kewenangan

4. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Sistem pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sebuah negara, terutama yang menggunakan jenis sistem politik Demokrasi Liberal. Pemilihan Umum yang mendistribusikan perwakilan kepentingan elemen masyarakat berbeda ke dalam bentuk representasi orang-orang partai di parlemen. Sebab itu, pemilihan sebuah sistem pemilihan umum perlu disepakati bersama antara partai-partai politik yang terdaftar (yang sudah duduk di parlemen) dengan pemerintah.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan penelitian dengan taraf pengetahuan ilmiah yang digunakan untuk menyimpulkan fakta-fakta atau arsip-arsip untuk mencapai kepastian mengenai suatu masalah.

Penelitian ini merupakan kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan-perpustakaan yang memiliki referensi yang relevan.

1. Jenis Dan Metode Penelitian

Jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis dan metode kualitatif. Jenis dan metode ini dipakai karena penulis bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang peran dan fungsi partai Golkar dalam sistem multi partai pada pemilu 2009-2014.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif,²⁰ penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan permasalahan penelitian yang didasarkan pada data verbal dan tidak menggunakan angka-angka kuantitatif untuk ditarik sebuah kesimpulan penelitian.

Metode Kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor adalah:

“prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”

Penelitian deskriptif adalah suatu metode di dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dengan ciri-ciri sebagai berikut:

²⁰ Tatang M Arifin, Menyusun rencana Penelitian, CV Rajawali, 1986, hal. 24

- a. Berusaha untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian.
- b. Data yang dikumpulkan disusun, dianalisis, dan digambarkan dalam bentuk tulisan.²¹

Lebih lanjut menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan ini diarahkan pada situasi dan individu tersebut secara holistik (utuh), dalam hal ini penulis tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Dalam melakukan penelitian, penulis tidak saja tereksresi secara eksplisit tetapi juga makna yang ada pada ekspresi itu. Begitu pula apa yang ada pada pemikiran atau pandangan. Dengan demikian penulis akan bisa memperoleh penjelasan dan pengertian yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena sosial serta dapat memberikan deskripsi.

Sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur dengan mengikuti pola pemikiran yang bersifat *empirical inductive*, segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

²¹ Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal 63

2. Jenis Unit Analisis

Unit analisa data adalah satuan terkecil yang merupakan obyek nyata yang akan diteliti sesuai dengan permasalahan yang ada dan pokok pembahasan masalah dalam penelitian. Unit analisa data berisi penegasan tentang unit atau kesatuan yang menjadi subyek atau obyek penelitian. Dalam kegiatan penyusunan unit analisa data ini unit analisisnya adalah pihak-pihak yang mempunyai relevansi dengan pembahasan untuk dijadikan sumber data yang diperlukan. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian yaitu peran dan fungsi partai Golkar dalam sistem multi partai pada pemilu 2009-2014.

3. Jenis Data

Data merupakan informasi mengenai keberadaan konsep penelitian yang kita peroleh dari unit analisis yang dijadikan sebagai sarana verifikasi empiris dalam kegiatan penelitian, adapun jenis-jenis data yang dipergunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh dari responden melalui wawancara terhadap pihak-pihak terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun pihak tersebut adalah berasal dari partai Golkar dalam hal ini pengurus partai Golkar D. I. Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang diperoleh tidak secara langsung yang mencatat keadaan konsep penelitian di dalam unit analisis yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Data yang diperoleh adalah dari literatur yang berupa kutipan dari media massa, buku-buku, internet, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dengan tujuan agar data-data yang dikumpulkan lebih relevan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini tidak membutuhkan data primer yang diperoleh secara langsung dari manusia atau responden, sedangkan data sekunder yang bersumberkan pada dokumentasi.

a. Wawancara/interview

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara, berkomunikasi langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada responden yaitu, berasal dari partai Golkar dalam hal ini pengurus partai Golkar DPD Provinsi D. I. Yogyakarta..

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen, buku catatan-catatan, dan literatur lainnya yang ada kaitannya dengan

penelitian. Melalui teknik dokumentasi akan diamati fenomena dari obyek yang diteliti, dari berbagai dokumen yang ada. Sartono menjelaskan bahwa dokumen sebagai bahan klasik untuk meneliti perkembangan historis yang khusus, biasanya digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan tentang apa, kapan, dan dimana. Jawaban disusun secara konfigurasi yang khas dan memuat fakta yang menyatakan secara deskriptif.²²

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh diklarifikasikan dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori guna memperoleh kesimpulan. Selanjutnya gejala yang ada dianalisis menggunakan makna yang bersifat menyeluruh. Dalam analisis kualitatif data yang diperoleh berupa, gambaran dan bukan angka-angka, sehingga dalam hasil laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data, data-data tersebut diperoleh dari, catatan laporan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi dan sebagainya.

²² Sartono Kartodirjo, 1990. *Metodelogi penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta. Hal. 63-64